



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARNO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **727047**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**Rp. **719.340.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah Seluas 283 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Bangunan Seluas 84.5 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
4. Tanah Seluas 1051 m2 di BANYUWANGI, WARISAN Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 660 m2 di BANYUWANGI, WARISAN Rp. 39.600.000
6. Tanah Seluas 2632 m2 di BANYUWANGI, WARISAN Rp. 157.920.000
7. Tanah Seluas 497 m2 di BANYUWANGI, WARISAN Rp. 29.820.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESINRp. **83.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA NC110D Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYARp. **40.000.000****D. SURAT BERHARGA**Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	857.640.000
III. HUTANG	Rp.	90.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	767.640.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.